

**ANALISIS RASIO TERHADAP KINERJA KEUANGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA BANDA ACEH**

***RATIO ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF THE
FINANCIAL MANAGEMENT AGENCY OF BANDA ACEH
CITY***

Cut Nyak Awalani Nur Rajita¹, Soraya Lestari²

Program Studi S-1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Ubudiyah, Jalan Alue Naga Desa
Tibang, Banda Aceh, Indonesia.

email: cutnyakawalaninurrijita2015@gmail.com¹, soraya.lestari@uui.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pendapatan dan belanja badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh periode 2015-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara rasio menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan rasio varian pendapatan rata-rata 137,40%, rasio pertumbuhan pendapatan rata-rata (positif) 11,35%, rasio pertumbuhan 11,05%, rasio efektifitas 137,41%, rasio efisiensi 3,07%. Kinerja keuangan belanja badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan rata-rata rasio varian belanja di 83,74%. rasio pertumbuhan belanja rata-rata 7,30%, rasio keserasian belanja untuk rata-rata belanja tidak langsung 68,68% dan rata-rata belanja tidak langsung 31,32%, rasio efisiensi rata-rata 83,74%. Pengujian secara parsial menyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) mampu menggambarkan pendapatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan mampu menggambarkan realisasi belanja dengan baik.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, LRA.

ABSTRACT

Exsperimen aims to determine the financial performance of revenue and expenditure financial management body of Banda Aceh period 2015-2017. This research is descriptive quantitative research, data collection techniques in this study using techniques of documentation, The data used are secondary data Realization Report Budget financial management bodies of Banda Aceh. Result research in the ratio indicates that the financial performance of the financial management of the agency income of Banda Aceh is generally quite good. This is evidenced ratio of average income variants 137.40%, the ratio of average income growth (positive) 11.35%, the growth rate 11.05%, 137.41% effectiveness ratio, efficiency ratio of 3.07%. The financial performance of the financial management of the agency shopping Banda Aceh is generally quite good. This is evidenced by the average ratio at 83.74% shopping variants. the ratio of the average expenditure growth of 7.30%, the ratio of the harmony of shopping for an average of 68.68% indirect expenditures and average expenditure not directly 31.32%, the average efficiency ratio of 83.74%. Partial test states that the revenue and expenditure budget has a positive effect on financial.

Keywords: Financial Performance, Budget Revenue, Expenditure, LRA.

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini perkembangan akuntansi publik di Indonesia semakin pesat, sehingga banyak perkembangan keuangan publik dalam pelaksanaan pengelolaannya. Seperti pada badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) Banda Aceh yang telah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah yang lebih tertib dan akuntabel karena pengelolaan keuangan daerah yang baik akan membuat aset daerah terjaga beserta dengan keuntungannya.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 bagian ke 3 (tiga) pasal 4 (empat) nomor (1) dan (2) tentang asas umum pengelolaan keuangan daerah yang berbunyi yaitu keuangan daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”.

Pengukuran kinerja keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah (Yuliana, 2014). Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis (Mahmudi, 2013:9). Efisien berarti penggunaan dana dalam menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran harus mencapai target, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan, penggunaan sumber daya dalam jumlah atau kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Yuliana, 2014).

Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Penelitian kinerja keuangan ini dikuatkan dengan adanya informasi yang memberitakan tentang kurang efisien dan efektifnya kinerja instansi Badan Pengelolaan Keuangan Kota dalam menangani pemungutan pajak di kota Banda Aceh yaitu dibuktikan dengan banyaknya pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak terealisasi selama periode 2015 sampai dengan 2017 bahkan ada beberapa tempat usaha yang menunggak pajak hingga 10 T

ahun, sehingga harus dilakukan pemutihan pajak pada Tahun 2017 (Serambinew.com). Hal ini juga di buktikan oleh Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dapat dilihat pada halaman Lampiran.

Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal pengukuran kinerja keuangan pada badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh. Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Analisis Rasio Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh” untuk tahun analisis 2015 sampai dengan 2017.

2. KAJIAN LITERATUR

1. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah realisasi pendapatan dan belanja yang disusun berdasarkan basis akrual. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah (Pramono, 2014).

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebuah daftar yang memuat semua rincian tentang penerimaan daerah atau pengeluaran belanja daerah selama satu tahun anggaran (Pramono, 2014).

3. Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah (Halim, 2014:50).

4. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah yang akan mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan di peroleh kembali pembayarannya oleh pemda (Maga, 2016).

5. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Analisis rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio akan dapat menjelaskan atau memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik atau buruknya keadaan atau posisi keuangan suatu instansi pemerintahan (Munawir, 2014:64).

6. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah

Analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dapat terlihat dari realisasi pendapatan dan anggaran, apabila realisasi melebihi anggaran yang telah dibuat maka kinerja pemerintah daerah dinilai baik (Halim, 2014: 268). Realisasi anggaran dapat dilakukan analisis kinerja keuangan pendapatan daerah dengan cara sebagai berikut:

- Rasio Varian Pendapatan Daerah
- Rasio Pertumbuhan Pendapatan Daerah
- Rasio Efektifitas Pendapatan Daerah
- Rasio Efisiensi Pajak Daerah

7. Analisis Rasio Kinerja Keuangan Belanja Daerah

Analisis kinerja keuangan belanja daerah merupakan analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi apakah suatu daerah atau instansi telah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif (Maga, 2016). Analisis rasio kinerja keuangan dan belanja daerah Menurut Yuliana (2014) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Rasio Varian Belanja Daerah
- Rasio Pertumbuhan Belanja Daerah
- Rasio Keserasian Belanja Daerah
- Rasio Efisiensi Belanja Daerah

8. Kerangka Teoritis

Kinerja keuangan adalah sebuah gambaran tentang kondisi keuangan pada suatu periode tertentu yang diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Pramono, 2014). Badan pengelolaan keuangan kota dalam melakukan kinerja keuangan (variabel terikat) merujuk kepada laporan realisasi anggaran (LRA) atau anggaran pendapatan dan belanja kota (APBD) (variabel bebas).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan populasi berupa data laporan realisasi anggaran (LRA) pada badan pengelolaan keuangan kota dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, adapun data populasi yang digunakan yaitu berupa pendapatan asli daerah (PAD) dan belanja daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu laporan realisasi anggaran dan data penunjang untuk melengkapi penelitian ini yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti, badan pengelolaan keuangan kota, buku-buku, jurnal, Web instansi, surat kabar. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data privat dan Studi kepustakaan merupakan yang berasal dari buku-buku dan dari jurnal-jurnal hasil penelitian

sebelumnya. Pada penelitian ini variabel dependennya adalah Kinerja Keuangan, sedangkan variabel independennya adalah anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan alat analisis berupa regresi linear berganda. Penelitian ini dilakukan dengan menguji kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh dengan melakukan uji rasio dan uji normalitas.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pendapatan dan belanja badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh periode 2015 sampai dengan periode 2017.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dan data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran (LRA). Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji rasio dan uji normalitas serta alat uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pengujian secara parsial dengan menggunakan uji statistik SPSS 24.

Dalam menganalisis kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh, peneliti melihat dari laporan realisasi anggaran tahunan yang meliputi penerimaan (Pendapatan Asli Daerah) dan pengeluaran (belanja langsung dan belanja tidak langsung) yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan kota di Banda Aceh. Data yang dianalisis yaitu pendapatan asli daerah dan belanja daerah pada badan pengelolaan keuangan kota tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017. Berikut ini adalah hasil penelitian badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.

1. Hasil Penelitian

Uji Rasio

a. Rasio Varian

Pendapatan

Hasil dari analisis rasio varian pendapatan badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada

Tahun 2015 sampai dengan 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1
Rasio Varian Pendapatan

Tahun	PENDAPATAN		
	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Rasio%
1	2	3	4
2015	Rp52.550.000.000	Rp74.874.373.085	142,48%
2016	Rp 60.865.000.000	Rp90.626.153.106	148,90%
2017	Rp74.675.000.000	Rp92.946.904.044	124,47%
Rata-rata	Rp188.090.000.000	Rp258.447.430.235	137,40%

Sumber: Data diolah (2019)

Rasio varian pendapatan BPKK selama tiga tahun dikatakan memiliki kinerja keuangan pendapatan yang baik karena telah mampu memperoleh pendapatan melebihi dari target yang di anggarakan. Hasil analisis rasio varian pendapatan pada tahun 2015 sebesar 142,48%, hasil rasio varian pendapatan pada tahun 2016 sebesar 148,90%, hasil rasio varian pendapatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 148,90%, hal ini menunjukkan bahwa pendapatan BPKK mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari rasio varian pendapatan selama tiga periode sehingga mendapatkan rata-rata sebesar 137,40%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan BPKK mengalami *fluktuasi* (naik/turun) sehingga diharapkan dimasa mendatang BPKK mampu *konsisten* dalam meningkatkan varian pendapatan dari tahun ke tahun.

b. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Hasil dari analisis rasio pertumbuhan pendapatan badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 2
Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Rasio %
1	2	3	4
2015	Rp 67.240.020.318	Rp 74.874.373.085	11,35%
2016	Rp 74.874.373.085	Rp 90.626.153.106	21,04%
2017	Rp 90.626.153.106	Rp 92.946.904.044	2,56%
Rata-rata	Rp 232.740.546.509	Rp 258.447.430.235	11,05%

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.2 Rasio pertumbuhan pendapatan BPKK selama tiga tahun mengalami pertumbuhan yang diharapkan secara positif. Hal ini ditunjukkan dengan rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2015 yaitu sebesar 11,35%, sehingga dapat dikatakan kinerja keuangan pendapatan mengalami peningkatan (*surplus*). Dari hasil rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2016 sebesar 21,04%, hal ini dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pada tahun 2016 mengalami peningkatan (*surplus*) pendapatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan hasil rasio pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 2,56%, hal ini dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada tahun 2017 mengalami penurunan (*defisit*) dari tahun sebelumnya. Hasil rasio pertumbuhan selama tiga periode

analisis mendapatkan rata-rata sebesar 11,05%. Dari hasil analisis rasio pertumbuhan pendapatan selama tiga tahun dapat dikatakan bahwa kinerja badan pengelolaan keuangan kota tidak mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan dimasa yang akan datang badan BPKK mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun.

c. Rasio Efektifitas Pendapatan

Hasil dari analisis rasio efektifitas pendapatan badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 3
Rasio Efektifitas Pendapatan BPKK

No	Tahun	Total Anggaran	Total Realisasi	Rasio %
1	2	3	4	5=(4-3)×100
1	2015	Rp52.550.000.000	Rp74.874.373.085	142,48%
2	2016	Rp60.865.000.000	Rp90.626.153.106	148,90%
3	2017	Rp74.675.000.000	Rp92.946.904.044	124,47%
Rata-rata		Rp188.090.000.000	Rp258.447.430.235	137,41 %

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.3 rasio efektifitas pendapatan BPKK menggambarkan bahwa total realisasi pendapatan telah melebihi dari total anggaran. Dapat dilihat hasil rasio efektifitas pada tahun 2015 sebesar 142,48%, sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas pendapatan dikatakan baik karena telah melebihi dari total anggaran pendapatan. Hasil rasio pada tahun 2016 sebesar 148,90%, hal ini dapat disimpulkan bahwa efektifitas pendapatan BPKK dikatakan baik karena mengalami peningkatan pendapatan dari tahun sebelumnya. Hasil rasio pada tahun 2017 sebesar 124,41%, sehingga dapat dikatakan bahwa efektifitas pendapatan BPKK pada tahun 2017 dapat dikatakan baik karena telah melebihi dari total anggaran, namun rasio efektifitas pendapatan BPKK tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hasil rasio dari tiga tahun mendapatkan rata-rata sebesar 137,41%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPKK dikatakan baik karena telah melebihi dari target anggaran tahun analisis, namun BPKK masih belum mampu meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun, sehingga diharapkan di masa mendatang BPKK tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan dari target anggaran saja namun juga mampu meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun.

d. Rasio Efisiensi Pendapatan

Hasil dari analisis rasio efisiensi pendapatan badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 4
Rasio Efisiensi Pendapatan BPKK

No	Uraian Pendapatan	Biaya Pemerolehan PAD			Rasio %
		Insentif Pemungutan Pajak Daerah	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	
1	2	3	4	5	6=(3+4)/5×100
2	2015	Rp1.090.358.628	Rp849.223.475	Rp74.874.373.085	2,59%
3	2016	Rp2.247.283.490	Rp618.694.285	Rp90.626.153.106	3,16%
4	2017	Rp2.402.283.136	Rp745.083.943	Rp92.946.904.044	3,39%
Rata-rata		Rp5.739.925.254	Rp2.213.001.703	Rp258.447.430.235	3,07%

Sumber: Data Olah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.4 Rasio efisiensi pendapatan BPKK tahun 2015 sampai 2017 dapat dikatakan telah efisien. Dapat dilihat dari hasil rasio efisiensi pendapatan terkecil terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 2,59%, dan rasio efisiensi pendapatan pada tahun 2016 mengalami peningkatan efisiensi yaitu sebesar 3,16%, sedangkan rasio efisiensi pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 3,39%. dengan rata-rata persentase efisiensi yang mencapai 3,07%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi pendapatan BPKK setiap tahunnya mengalami peningkatan, penulis mengharapkan BPKK mampu lebih mengoptimalkan pengeluaran untuk biaya memperoleh PAD karena kinerja keuangan pemerintah dapat dikatakan baik apabila semakin kecil memperoleh rasio efisiensi.

e. Rasio Varian Belanja Daerah

Hasil dari analisis rasio varian belanja daerah badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 5
Rasio Varian Belanja BPKK

Tahun	BELANJA		
	APBD	Realisasi	Rasio %
1	2	3	4
2015	Rp44.438.941.504	Rp32.790.819.068	73,79%
2016	Rp30.841.746.953	Rp28.711.565.330	93,09%
2017	Rp36.996.038.649	Rp32.521.404.148	87,91%
Rata-rata	Rp112.276.727.106	Rp94.023.788.546	83,74%

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 4.5 Hasil analisis varian belanja BPKK selama tahun 2015 sampai 2017 dapat dikatakan baik. Dapat dilihat dari rasio varian belanja BPKK pada tahun 2015 sebesar 73,79% dikatakan baik, dan pada tahun 2016 rasio varian belanja BPKK sebesar 93,09%, disimpulkan bahwa pada tahun 2016 mengalami peningkatan belanja dari tahun sebelumnya. Sedangkan rasio varian belanja pada tahun 2017 sebesar 87,91%, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017 mengalami penurunan belanja dari tahun sebelumnya. Dari tiga tahun periode analisis rata-rata rasio varian belanja sebesar 83,74%, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BPKK dapat dikatakan baik karena telah mampu mengoptimalkan pengeluaran belanja BPKK dengan masih terdapat sisa anggaran dari jumlah yang di anggarkan.

f. Rasio Pertumbuhan Belanja

Hasil dari analisis rasio pertumbuhan belanja badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 6
Rasio Pertumbuhan Belanja BPKK

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Rasio%
1	2	3	4
2015	Rp26.122.305.466	Rp32.790.819.068	25,52%
2016	Rp32.790.819.068	Rp28.711.565.330	-12,44%
2017	Rp28.711.565.330	Rp32.521.404.148	13,27%
Rata-rata	Rp87.624.689.864	Rp94.023.788.546	7,30%

Sumber: Data diolah (2019)

Dari Tabel 6 Hasil analisis rasio pertumbuhan belanja BPKK selama tahun 2015 sampai 2017 dapat dikatakan mengalami *fluktuasi* (naik, turun) pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari rasio pertumbuhan belanja tahun 2015 yaitu sebesar 25,52%, sehingga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan belanja tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hasil rasio pertumbuhan belanja pada tahun 2016 yaitu sebesar -12,44%, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan belanja pada tahun 2016 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hasil rasio pertumbuhan pada tahun 2017 yaitu sebesar 7,30%, dapat dikatakan bahwa pertumbuhan belanja mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dari hasil rasio pertumbuhan dalam tiga periode analisis mendapatkan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,30%, hal ini menyatakan bahwa pertumbuhan belanja mengalami *fluktuasi* setiap tahunnya karena adanya perubahan nilai tukar rupiah dan penyesuaian beberapa faktor makro ekonomi.

g. Rasio Kesenjangan Belanja

Hasil dari analisis rasio kesenjangan belanja badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 7
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Tahun	Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja	Belanja Langsung Terhadap total Belanja	Rasio %	
			Rasio Belanja Tidak Langsung	Rasio Belanja Langsung
1	2	3	4=(2/2)×100	5=(3/3)×100
2016	Rp22.347.238.327	Rp6.364.327.003	77,83%	22,17%
	Rp28.711.565.330	Rp28.711.565.330		
2017	Rp20.896.127.139	Rp11.625.277.009	64,25%	35,75%
	Rp32.521.404.148	Rp32.521.404.148		
Rata-Rata			68,68%	31,32%

Sumber: Data diolah (2019)

Tahun	Belanja Tidak Langsung Terhadap Total Belanja	Belanja Langsung Terhadap total Belanja	Rasio %	
			Rasio Belanja Tidak Langsung	Rasio Belanja Langsung
1	2	3	4=(2/2)×100	5=(3/3)×100
2015	Rp20.971.359.509	Rp11.819.459.559	63,95%	36,05%
	Rp32.790.819.068	Rp32.790.819.068		

Berdasarkan Tabel 7 perhitungan di atas dapat terlihat bahwa selama tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagian besar dana yang dialokasikan lebih besar untuk belanja tidak langsung dibandingkan belanja langsung sehingga rasio belanja langsung relatif lebih kecil dari belanja tidak langsung. Hasil rasio keserasian belanja tidak langsung pada tahun 2015 yaitu sebesar 63,95% dan pada tahun 2016 sebesar 77,83% sehingga dapat dikatakan bahwa rasio belanja tidak langsung mengalami kenaikan. Rasio keserasian belanja pada tahun 2017 rasio keserasian belanja tidak langsung sebesar 64,25% mengalami penurunan dengan rata-rata rasio keserasian belanja sebesar 68,68%. Sedangkan Rasio keserasian untuk belanja langsung pada tahun 2015 sebesar 36,05% dan pada tahun 2016 sebesar 22,17%, sehingga dapat dikatakan bahwa belanja langsung mengalami penurunan belanja. Namun pada tahun 2017 mengalami kenaikan rasio belanja yaitu sebesar 35,75% dengan rata-rata selama tiga tahun sebesar 31,32%.

h. Rasio Efisiensi Belanja

Hasil dari analisis rasio efisiensi belanja badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) pada tahun 2015 sampai dengan 2017 sebagai berikut:

Tabel 8
Rasio Efisiensi Belanja BPKK

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi%
1	2	3	4
2015	Rp30.841.746.953	Rp28.711.565.330	74,79%
2016	Rp36.996.038.649	Rp32.521.404.148	93,09%
2017	Rp112.276.727.106	Rp94.023.788.546	87,90%
Rata-Rata			83,74%

Sumber: Data diolah (2019)

Berdasarkan Tabel 8 Rasio efisiensi belanja BPKK selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dapat dikatakan berdistribusi normal. Dapat dilihat rasio efisiensi pada tahun 2015 sebesar 74,79%, rasio efisiensi tahun 2016 mengalami peningkatan belanja dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 93,79% , namun rasio efisiensi tahun 2017 mengalami penurunan belanja yaitu sebesar 87,90%. Selama 3 (tiga) periode tahun analisis rata-rata rasio efisiensi belanja daerah yaitu sebesar 83,74%, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi belanja badan pengelolaan keuangan kota selama tiga tahun mengalami penghematan anggaran karena rasio efisiensi secara umum dapat dikatakan kurang dari seratus persen.

2. Hasil Uji Normalitas

a. Hasil Deskriptif Data Penelitian

Tabel 9
Analisis Deskriptif Statistics Data Penelitian

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Rasio Varian Pendapatan	3	24,47	48,90	38,6167	12,66492
RasioPertumbuhan Pendapatan	3	2,56	1135,00	386,2000	648,54565
Rasio Efektifitas Pendapatan	3	124,47	148,90	138,6167	12,66492
Rasio Efisiensi Pendapatan	3	2,59	3,39	3,0467	,41187
Rasio Varian Belanja	3	73,79	93,09	84,9300	9,98913

Rasio Pertumbuhan Belanja	3	-12,44	25,52	8,7833	19,37364
Rasio Keserasian Belanja	3	63,95	77,83	68,6767	7,92844
Rasio Efisiensi Belanja	3	74,00	93,00	85,0000	9,84886
Kinerja Keuangan	3	97,06	518,84	274,0400	218,91609
Valid N (listwise)	3				

Sumber: Data Diolah (2019)

Penjelasan deskriptif data penelitian dengan tiga tahun periode analisis selama periode 2015 sampai 2017 berdasarkan tabel 4.9 diperoleh rasio varian pendapatan dengan nilai persentase terendah (*minimum*) selama 3 tahun yaitu 24,47%, rasio pertumbuhan pendapatan dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu 2,56%, rasio efektifitas pendapatan dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu 124,47%, rasio efisiensi pendapatan dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu 2,59%, rasio varian belanja dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu 73,79%, rasio pertumbuhan belanja dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu -12,44%, rasio keserasian belanja dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu 63,95%, rasio efisiensi belanja dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu 63,95%, dan kinerja keuangan dengan nilai persentase terendah (*minimum*) yaitu 97,06%.

Penjelasan deskriptif data penelitian dengan tiga tahun periode analisis berdasarkan tabel 4.9 diperoleh rasio varian pendapatan dengan nilai persentase tertinggi (*maximum*) selama 3 tahun yaitu 48,90%, rasio pertumbuhan pendapatan nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 1135,00%, rasio efektifitas pendapatan nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 148,90%, rasio efisiensi pendapatan nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 3,39%, rasio varian belanja nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 93,09%, rasio pertumbuhan belanja nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 25,52%, rasio keserasian belanja nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 77,83%, rasio efisiensi belanja nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 93,00%, kinerja keuangan nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 518,84%.

Penjelasan deskriptif data penelitian dengan tiga tahun periode analisis berdasarkan tabel 4.9 diperoleh rasio varian pendapatan dengan nilai persentase rata-rata (*mean*) selama 3 tahun yaitu 38,61%, rasio pertumbuhan pendapatan nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 386,20%, rasio efektifitas pendapatan nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 138,61%, rasio efisiensi pendapatan nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 3,04%, rasio varian belanja nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 84,93%, rasio pertumbuhan belanja nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 8,78%, rasio keserasian belanja nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 68,67%, rasio efisiensi belanja nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 274,04%, kinerja keuangan nilai persentase rata-rata (*mean*) yaitu 518,84%.

Penjelasan deskriptif data penelitian dengan tiga tahun periode analisis selama periode 2015 sampai 2017 berdasarkan tabel 4.9 diperoleh rasio varian pendapatan dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) selama 3 tahun yaitu 12,66%, rasio pertumbuhan pendapatan nilai persentase tertinggi (*maximum*) yaitu 648,54%, rasio efektifitas pendapatan dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) yaitu 12,66%, rasio efisiensi pendapatan dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) yaitu 0,41%, rasio varian belanja dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) yaitu 9,98%, rasio pertumbuhan belanja dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) yaitu 19,37%, rasio keserasian belanja dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) yaitu 7,92%, rasio efisiensi belanja dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) yaitu 9,84%, kinerja keuangan dengan nilai standar deviasi (*standard deviation*) yaitu 218,91%.

2. Hasil pengujian hipotesis

Tabel 10
Hasil Regresi Linear Berganda Untuk Analisis Rasio Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Coefficients ^a					
Model	B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1 (Constant)	237.088	135.145		1.754	.013
Rasio Anggaran Pendapatan	.892	.978	.291	.913	.035
Rasio Belanja Daerah	-.244	1.726	-.045	-.141	.049

Unstandardized Coefficients

a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan

Sumber: Data Diolah (2019)

a. Pengujian Secara

Parsial

▪ Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel anggaran pendapatan memiliki nilai t sebesar

0,913 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,035 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Penelitian ini berhasil menunjukan pengaruh yang signifikansi anggaran pendapatan terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh. Oleh karena itu hipotesis H_{01} ditolak dan menerima hipotesis H_{a1} yang berarti anggaran pendapatan berpengaruh terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.

Nilai koefisien regresi berdasarkan Tabel 4.30 menunjukan bahwa pengaruh anggaran pendapatan terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota sebesar 0,892. Nilai koefisien regresi sebesar 0,892 menunjukan bahwa koefisien regresi anggaran pendapatan terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$) berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa anggaran pendapatan (X_1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) apabila $\beta_1 \neq 0$. Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menolak H_0 (hipotesis nol) atau menerima H_a (hipotesis alternative). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa anggaran pendapatan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.

▪ Analisis Rasio Belanja Daerah Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja daerah memiliki nilai t sebesar -0,141 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,049 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Hasil penelitian ini menolak H_{02} dan menerima hipotesis alternative H_{a2} . Hal ini yang berarti belanja desa berpengaruh signifikansi terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.

Nilai koefisien regresi berdasarkan Tabel 4.30 menunjukan pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota sebesar -0,244. Nilai koefisien regresi sebesar -

0,244 menunjukan bahwa koefisien regresi belanja daerah terhadap Kinerja keuangan tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$) berdasarkan rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk menyatakan bahwa belanja daerah (X_2) berpengaruh terhadap Kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota (Y) apabila $\beta_2 \neq 0$. Mengacu pada syarat tersebut, hasil penelitian ini menerima H_a (hipotesis alternatif) atau menolak H_0 (hipotesis nol). Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap Kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh. Setiap kenaikan belanja daerah sebesar 1% akan menurunkan kinerja keuangan sebesar -0,244% dengan asumsi variabel anggaran pendapatan adalah konstan.

3. Pembahasan

▪ Analisis Rasio Anggaran Pendapatan Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan analisis rasio pendapatan yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pendapatan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh secara umum dikatakan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil rasio varian pendapatan daerah selama tiga tahun dengan rata-rata di atas 137,40%. Hasil rasio pertumbuhan pendapatan daerah selama tiga tahun dengan rata-rata (positif) selama tiga tahun sebesar 11,35%. Hasil Analisis rasio efektifitas dengan nilai rata-rata selama tiga tahun sebesar 137,41%. Hasil analisis rasio efisiensi pendapatan asli daerah selama tiga tahun dengan rata-rata sebesar 3,07%.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan uji parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikansi terhadap kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh periode 2015-2017. Hal ini menyatakan bahwa pendapatan asli daerah yang dihasilkan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh periode 2015-2017 memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan instansi sehingga berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan dapat diterima. Dengan demikian, semakin tinggi anggaran pendapatan maka akan semakin baik kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota.

▪ Analisis Rasio Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan analisis rasio belanja yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan belanja pada badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh secara umum dikatakan telah optimal. Hal ini dibuktikan dengan hasil rasio varian belanja daerah selama tiga tahun dengan rata-rata sebesar 87,74%. Hasil rasio pertumbuhan belanja daerah mengalami pertumbuhan positif dari tahun 2015 hingga 2017 (tiga tahun) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 7,30%. Hasil rasio keserasian belanja daerah menunjukkan bahwa badan pengelolaan keuangan kota lebih memprioritaskan dananya untuk belanja tidak langsung dibanding belanja langsung yaitu dapat dilihat dengan rata-rata untuk total belanja tidak langsung sebesar

68,68% dan untuk total belanja langsung sebesar 31,32%. Hasil Analisis rasio efisiensi belanja daerah yang digunakan badan pengelolaan keuangan kota dinilai telah efisien karena kurang dari 100% dengan nilai rata-rata selama tiga tahun sebesar 83,74%.

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial yang telah dilakukan menunjukkan bahwa belanja daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pada badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh periode 2015-2017. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kegiatan belanja daerah yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan kota menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan besarnya belanja daerah akan menurunkan kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis uji rasio maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pendapatan dan belanja badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) Banda Aceh secara umum dapat dikatakan baik karena telah mampu meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan pengeluaran belanja. Adapun rasio varian Pendapatan BPKK selama tahun 2015 sampai dengan 2017, secara umum dapat dikatakan baik karena telah melebihi dari target anggaran, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio varian pendapatan sebesar 137,40%. Rasio pertumbuhan pendapatan BPKK secara umum dapat dikatakan mengalami peningkatan (*suplus*) kinerja keuangan, hal ini juga ditunjukkan dengan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,05%. Rasio efektifitas pendapatan BPKK secara umum dapat dikatakan baik karena realisasi pendapatan telah melebihi dari anggaran pendapatan, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio efektifitas pendapatan sebesar 83,74%. Rasio efisiensi pendapatan BPKK secara umum dapat dikatakan mengalami peningkatan efisiensi, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio pendapatan BPKK sebesar 3,07%. Rasio varian belanja BPKK secara umum dapat dikatakan baik karena telah mampu mengoptimalkan pengeluaran belanja, hal ini ditunjukkan dengan rasio varian belanja dengan rata-rata pencapaian target realisasi belanja sebesar 93,48%. Rasio pertumbuhan belanja BPKK ditunjukkan dengan rata-rata rasio pertumbuhan belanja sebesar 7,30%. Rasio keserasian belanja BPKK secara umum menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dana yang di alokasikan lebih besar untuk belanja tidak langsung dari pada belanja langsung, hal ini ditunjukkan dengan rata-rata rasio belanja tidak langsung sebesar 68,68%, dan rata-rata belanja

langsung sebesar 31,32%. Rasio efisiensi belanja BPKK secara umum menunjukkan berdistribusi normal, hal ini menunjukkan dengan rata-rata rasio efisiensi pertumbuhan sebesar 83,74%.

Pengujian secara parsial menyatakan bahwa anggaran pendapatan berpengaruh positif terhadap kinerja dan anggaran belanja berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa badan pengelolaan keuangan kota (BPKK) mampu menggambarkan pendapatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan mampu menggambarkan realisasi belanja dengan baik.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dari uji rasio dan uji asumsi klasik, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut. Bagi badan pengelolaan keuangan kota perlu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan cara meningkatkan efisiensi untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD. Efisiensi akan meningkat jika badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh dapat melaksanakan secara lebih optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah yang masih memiliki beberapa pos yang terdapat kontribusi kecil dalam PAD. Dapat juga dengan cara melakukan pengawasan dan pengendalian secara benar dan berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pemerolehan PAD. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh agar lebih mengoptimalkan pengelolaan keuangan, terutama dalam pemanfaatan belanja langsung dan belanja tidak langsung yang akan berdampak terhadap Akuntabilitas badan pengelolaan keuangan kota (BPKK). Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan periode tahun analisis agar lebih akurat dalam menganalisis kinerja keuangan badan pengelolaan keuangan kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Selemba Empat. Jakarta
- Maga, Farel, F. 2016. Pengaruh Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perekonomian Di Kabupaten Sorong Selatan. *Jurnal. Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi Manado*. Vol. 16, No.1, Hal.5-18.
- Lazyra, Ks. 2016. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi kedua, Yogyakarta, UPP STIM YKPN
- Munawir, S. 2014. *Analisa Laporan Keuangan*. Edisi Keempat. Yogyakarta Liberty. Yogyakarta.
- Pramono, J. 2014. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta). *Jurnal. Among Makarti*. Vol. 7, No.13, Hal.4-15.

_____. 2017. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta, CV. Bandung. Yuliana. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*. Vol.5, No. 1, Hal.7-16 www.aceh.tribunnews.com. (di akses 1 Januari 2019). bpkk.bandaacehkota.go.id. (di akses 2 Januari 2019).